

PROSES INTEGRASI DAN STRATEGI KOMUNIKASI ALIRAN PENGHAYAT KAPRIBADEN DI DESA CANDIPARI, SIDOARJO

Mevy Eka Nurhalizah
UIN Sunan Ampel Surabaya
mevyekanurhalizab@gmail.com

Abstract

This paper tries to illustrate how the process of social integration and communication strategies of minority groups in the Kapribaden community in discriminatory culture in Candipari Village, Porong District. This paper uses a descriptive method with field observations, interviews and documentation studies. The results of the study show that the integration process occurred due to three discrimination experienced by the Kapribaden group namely the prohibition of ritual worship in Candipari and Candi Sumur, coercion to return to Islam and the prohibition on using village graves for followers who died. Among the three phases of integration, the integration is still in the accommodation phase. The phase in which collaboration is still being carried out despite differences of understanding. That is because there are the same interests and goals. In the accommodation phase, compromise and tolerance are reached, where two or more opponents become equally strong. While the communication strategy undertaken by the Kapribaden group is to use translation by providing resistance.

Keywords: *Integration, Kapribaden, Minority, Communication Strategy.*

Abstrak

Tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana proses integrasi sosial dan strategi komunikasi kelompok minoritas Penghayat Kapribaden dalam kultur diskriminatif di Desa Candipari, Kecamatan Porong. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan observasi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil studi menunjukkan proses integrasi terjadi dikarenakan tiga diskriminasi yang dialami kelompok Kapribaden yakni pelarangan ritual ibadah di Candipari dan Candi Sumur, pemaksaan kembali untuk masuk Islam serta pelarangan menggunakan makam desa untuk pengikut yang meninggal dunia. Diantara tiga fase integrasi, integrasi yang terjadi masih berada fase akomodasi. Fase di mana kerjasama masih tetap dilakukan meskipun terdapat perbedaan paham. Hal tersebut dikarenakan adanya kepentingan dan tujuan yang sama. Dalam fase akomodasi tersebut tercapailah kompromi dan toleransi, di mana dua lawan atau lebih menjadi sama kuat. Sedangkan strategi komunikasi yang dilakukan oleh kelompok Kapribaden adalah menggunakan translasi dengan memberikan perlawanan.

Kata Kunci: *Integrasi, Kapribaden, Minoritas, Strategi Komunikasi*

PENDAHULUAN

Sebelum enam agama ditetapkan di Indonesia, masyarakat menganut aliran kepercayaan yang bercorak dinamisme. Kepercayaan tersebut kemudian berkembang menjadi kepercayaan terhadap figur tertentu seperti dewa, nenek moyang maupun roh. Pada akhirnya perkembangan kepercayaan masyarakat Indonesia saat ini berada pada satu figur yaitu Tuhan, namun aliran kepercayaan masih tetap ada. Aliran kepercayaan disebut juga sebagai aliran kebatinan yang berarti kepercayaan terhadap Tuhan namun tidak berdasarkan pada ajaran agama tertentu. Hal ini dimaksudkan bahwa perihal ibadah dan aturan, penganut aliran kepercayaan berbeda dengan sistem agama.¹ Mereka memiliki hukum tersendiri untuk mengatur kehidupannya.

¹ Eko Rusadi, *Ugasan Torop Dalam Ugamo Malim (Studi Kasus di Lembaga Sosial Milik Masyarakat Parmalim)*, (Medan: Skripsi Tidak diterbitkan, 2010), 2

Menurut sejarah, aliran kepercayaan sempat berkembang bebas di Indonesia sebelum peristiwa G30SPKI. Pasca peristiwa kelam tersebut, aliran kepercayaan sering dihubungkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal tersebut menyebabkan kekhawatiran terhadap para pengikut aliran kepercayaan, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya mengikuti agama resmi.² Selain itu, masa pemerintahan Presiden Soekarno juga menetapkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 perihal pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama.³ Pemerintah menetapkan lima agama di Indonesia yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Penetapan tersebut membuat aliran kepercayaan tidak mendapatkan pengakuan dari negara. Tahun 1960, Menteri Agama mengeluarkan ketentuan bahwa agama yang diakui oleh negara harus memenuhi empat unsur, yakni adanya kepercayaan terhadap Tuhan, memiliki sistem hukum yang jelas bagi para penganutnya, memiliki kitab suci dan memiliki Nabi.⁴ Keadaan tersebut semakin membuat para penganut aliran kepercayaan sulit untuk berkembang dan tidak mendapatkan tempat.

Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dianggap sebagai cara untuk memarjinalkan kelompok aliran kepercayaan dengan melakukan diskriminasi. Selain dua aturan di atas, aturan lain yang dikeluarkan adalah perihal pembuatan Kartu Tanda Masyarakat dan Kartu Keluarga dengan hanya disediakan lima pilihan agama yang telah diresmikan oleh pemerintah. Bentuk diskriminasi lainnya adalah stereotip negatif dan pembatasan perang di ruang publik. Salah satu alasannya adalah kelompok aliran kepercayaan hanya dianggap sebagai sebuah “sekte”

² Niels Mulder, *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil*, (Jakarta: Gramedia, 1984), 7

³ Kementerian Agama, “Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama”, dalam <http://produk-hukum.kemendagri.go.id/?q=&s=headline&t=1965>, diakses 25 Desember 2019

⁴ Ahmad Syafii Mufid, *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 12

mistik bukan agama.⁵ Sekte mistik konon dilatarbekangi oleh naluri religius yang dimiliki oleh manusia, terutama orang Jawa. Mereka menganggap bahwa seberapapun hebatnya manusia, ada figur yang mengendalikan alam semesta.⁶

Dimensi mistik dalam agama bermula ketika manusia mulai sadar akan adanya Tuhan. Kesadaran ini mempengaruhi bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan yang biasanya direfleksikan dalam sikap takut, cinta, rindu kepada Tuhan. Hal tersebut secara terus menerus akan menjadi pola atau metode bagaimana manusia mampu menyatu dengan Tuhan. Sebenarnya, kepercayaan bukan hanya bersandar pada formalitas agama melainkan bagaimana pengamalan terhadap ajaran untuk menyembah Tuhan dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama makhluk hidup.⁷

Tahun 1978 sidang umum MPR dilakukan dan menghasilkan ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 yang berisi mengenai kejelasan perihal agama dan aliran kepercayaan.⁸ Hal tersebut digunakan untuk memperjelas keraguan masyarakat mengenai agama dan aliran kepercayaan. Ketetapan tersebut seperti angin segar bagi para penganut aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan menjadi bebas dan semakin berkembang. Pada tanggal 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mengenai status kolom agama pada Kartu Tanda Masyarakat (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi para penganut aliran kepercayaan. Keputusan tersebut menjadikan para pengikut aliran kepercayaan memiliki hak yang sama layaknya para penganut agama resmi di Indonesia dalam hal pencatatan status kepercayaannya dalam

⁵ Cliford Geertz, *The Religion of Java (Abangan. Santri. Priyayi dalam Masyarakat Jawa)* terj. Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), 453

⁶ Haryo Aji Nugroho, *Dunia Mistik Orang Subud*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), 3

⁷ Abu al-Wafa al-Ghanimi Al-Taftazani, *Sufi dari Zaman ke Zaman*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), 11

⁸ Moch Syafi'udin, *Konsepsi Manusia Menurut Penghayat Kapribaden*, (Surabaya: Skripsi tidak diterbitkan, 1996), 2

KTP.⁹ Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mencatat terdapat 1.515 organisasi aliran kepercayaan dan 245 diantaranya sudah memiliki kepengurusan di tingkat nasional dengan jumlah sekitar 10 juta anggota.¹⁰ Dari banyaknya aliran kepercayaan yang tercatat, salah satunya berkembang di Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, yakni Kapribaden.

Kapribaden merupakan salah satu aliran kepercayaan yang dibawa oleh seseorang yang bernama Romo Semono Sastrohaddidjojo. Ia menerima wahyu pada 14 November 1955 di Surabaya. Wahyu yang ia peroleh disebut dengan panca ghaib yang terdiri dari *kunci*, *asmo*, *mijil*, *singkir* dan *paweling*. Ia mendapatkan tugas untuk memberi pencerahan kepada sesama dengan mengenalkan hidup manusia yang ada di dalam raganya, agar dapat menerima petunjuk dan tuntunan hidup, mengikuti jalannya hidup, menuju ke sumber hidup yakni Tuhan yang maha esa. Tugas tersebut ia jalani selama 15 tahun, mulai tahun 1955-1981.¹¹

Pada 29 April 1977, Romo Semono memerintahkan pengikutnya membentuk organisasi bernama Paguyuban Penghayat Kapribaden. Pada 30 Juli 1978, di Balai Mataram Taman Mini Indonesia Indah, Paguyuban Penghayat Kapribaden diresmikan oleh Mayjen TNI (Purn) Amir Murtono, S.H selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar saat itu (Kapribaden.org). Aliran kepercayaan Kapribaden terdaftar pada Dir. Binyat. Ditjenbud, Depdikbud RI dengan nomor inventarisasi I.099/N.1.1/F.3/1980 dan pada Kejaksaan Agung RI Nomor 250 tahun 1986.¹² Meskipun aliran ini sudah mendapatkan pengakuan dari

⁹ Aryono, "Pergulatan Aliran Kepercayaan Dalam Panggung Politik Indonesia. 1950-an-2010-an: Romo Semono Sastrohaddidjojo dan Aliran Kapribaden", *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(1), 2008, 59

¹⁰ Fulthoni, *Buku Saku Kebebasan Bergama dan Berkeyakinan [Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan]*, (Jakarta: ILRC, 2009), 3

¹¹ Paguyuban Penghayat Kapribaden, "Sejarah Kapribaden", dalam http://www.kapribaden.org/K_Sejarah%20Kapribaden.php, diakses pada 25 Desember 2019

¹² Wahjono GS Wirjohardjo, *Naskah Paguyuban Penghayat Kapribaden*. dalam *Inventarisasi DepDikBud. Sarasehan Agung IV: Paguyuban Penghayat Kapribaden*, (Jakarta; tanpa penerbit, 2007), 6

negara, tidak membuat masyarakat mengakui aliran tersebut. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa Kapribaden adalah aliran sesat sehingga banyak mengalami pertentangan dan diskriminasi bagi para pengikutnya.

Hal tersebut juga terjadi di Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Di desa ini terdapat aliran Kapribaden yang mulai berkembang sejak empat tahun yang lalu. Meskipun aliran kepercayaan ini telah diakui, namun kultur diskriminatif terhadap kelompok minoritas tidak terkikis di tempat ini. Sebelumnya terdapat aliran kepercayaan yang sebelumnya berkembang, yakni Saptodharmo. Aliran ini sempat mengalami diskriminasi. Salah satunya adalah ketika salah satu pengikutnya meninggal dunia, pemuka agama di desa tersebut enggan untuk mengurus jenazahnya. Namun, diskriminasi terhadap kelompok ini tidak separah terhadap penghayat Kapribaden. Hal tersebut dikarenakan aliran ini sudah sangat lama berkembang ditengah masyarakat.

Menjadi kelompok minoritas bukanlah hal yang mudah bagi para pengikut aliran Kapribaden. Diskriminasi yang mereka terima tentu tidak membuat mereka diam. Mereka mencoba melakukan perlawanan untuk meminimalisir diskriminasi yang mereka terima. Oleh sebab itu ditengah kultur diskriminatif tersebut, penghayat Kapribaden melakukan proses integrasi dan strategi komunikasi guna melawan agar kehadiran mereka bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Upaya resistensi yang dilakukan oleh para pengikut Kapribaden membuat keberadaan Kapribaden tetap eksis di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Dalam penelitian ini, gambaran mengenai eksistensi, proses integrasi dan strategi komunikasi yang dilakukan oleh pengikut Kapribaden di Desa Candipari yang menjadi fokus penelitian.

KAJIAN TEORI

Teori Integrasi Sosial

Secara sosiologis, teori integrasi sosial masuk ke dalam paradigma fungsionalisme struktural milik Talcott Parson. Paradigma ini beranggapan bahwa masyarakat berada pada sistem sosial yang saling

mengikat sehingga menentukan keseimbangan. Anggapan tersebut dapat terlihat dalam dua pengertian integrasi sosial yakni, pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial, kedua, menyatukan unsur dalam masyarakat sehingga ketertiban sosial muncul.¹³ Integrasi sosial tidak hanya terjadi dalam kelompok atau organisasi tertentu tapi bisa juga terjadi dalam masyarakat secara keseluruhan.¹⁴

Proses integrasi sosial dapat terjadi jika memenuhi tiga syarat. *Pertama*, adanya kesepakatan mayoritas anggotanya pada nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental. *Kedua*, saling mengawasi aspek sosial, yakni menjaa terjadinya dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas. *Ketiga*, ketergantungan kelompok sosial dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, proses integrasi sosial dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan dari konflik sebagai fenomena sosial dan perubahan. Menurut Ralf Dahrendrof, fenomena sosial akan selalu hadir dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan dua pola.¹⁶ *Pertama*, mempertemukan kepentingan antar kelompok yang berkonflik untuk mengurangi perbedaan. *Kedua*, melakukan usaha penguatan nilai kebersamaan.

Integrasi yang notabene adalah proses mempertahankan kelangsungan hidup kelompok dapat tercapai melalui beberapa fase yakni fase akomodasi, koordinasi dan asimilasi.¹⁷ *Pertama*, fase akomodasi adalah fase di mana kerjasama masih tetap dilakukan meskipun terdapat perbedaan paham. Hal tersebut dikarenakan adanya

¹³ George Ritzer, dan Dauglas J Goodman, *Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Moderen*, terj. Nurhadi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 258

¹⁴ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*, terj. Robert MZ Lawang, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1986), 165

¹⁵ George Ritzer, dan Dauglas J Goodman, *Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Moderen*, 259

¹⁶ Maswadi Rauf, *Konsensus Politik Sebuah Penjajagan Teoritik*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000), 15

¹⁷ Astrid S Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Bina Cipta,1977), 123-127

kepentingan dan tujuan yang sama. Dalam fase akomodasi tersebut tercapailah kompromi dan toleransi, di mana dua lawan atau lebih menjadi sama kuat. *Kedua*, fase koordinasi yakni kebiasaan bekerjasama yang pada akhirnya mencapai situasi di mana untuk bekerjasama harus dengan kesediaan dan kesepakatan terlebih dahulu. *Ketiga*, Fase asimilasi yakni fase di mana terjadi proses mengakhiri kebiasaan lama sehingga muncul perubahan dari nilai-nilai dan kebudayaan semula, dan sekaligus mempelajari dan menerima kehidupan yang baru.

Terdapat dua faktor yang menjadi pendukung terjadinya integrasi sosial yakni interaksi sosial dan jarak sosial yang mendukung komunikasi.¹⁸ Jarak sosial dipengaruhi oleh dua faktor yakni subjektif dan obyektif. Faktor subjektif adalah perasaan dan pikiran individu atau kelompok terhadap kelompok lain yang akan diajak berkomunikasi. Sedangkan faktor obyektif adalah jarak yang ditentukan oleh keadaan geografis dan kesulitan transport untuk melakukan komunikasi. Ketika jarak sosial telah mendukung, maka komunikasi akan berjalan lancar, sehingga mampu menciptakan integrasi sosial.

Teori Kelompok Bungkam (Muted Group Theory)

Muted Group Theory adalah teori yang dicetuskan oleh Edwin dan Shirley Ardener yang merupakan seorang antropolog sosial yang tertarik pada struktur dan hierarki sosial.¹⁹ *Muted Group Theory* ini kemudian menarik perhatian para aktivis feminis seperti Dale Spender dan Cherris Kramae untuk melakukan modifikasi pada teori tersebut. Modifikasi tersebut dikaitkan dengan dinamika kelompok laki-laki dan perempuan. laki-laki dianggap sebagai kelompok dominan. Spender mengembangkan gagasan Ardener perihal kaum laki-laki yang menguasai bahasa. Penguasaan laki-laki terhadap bahasa mempermudah laki-laki untuk mempengaruhi dan memaksa perempuan untuk mengikuti pandangannya. Akibatnya, suara perempuan bertolak dari pengalaman mereka jarang terdengar sebab sistem bahasa yang ada tidak

¹⁸ *Ibid.*, 131-133

¹⁹ C. J Leary dan Pat Gannon Wall, "A Sentence Made by Men: A Muted Group Theory Revisited." *The European Journal of Women's Studies*, 3(6). 1999, 22

mengakomodasi minat dan perhatian para perempuan. Solusi dari hal tersebut didapatkan oleh perempuan dengan dua cara, yakni memaksakan diri menggunakan bahasa laki-laki yang artinya mengalienasi perempuan dari pengalamannya sendiri atau tidak bicara sama sekali (*silenced*). Solusi yang paling banyak diterapkan oleh perempuan adalah bungkam. Di lain sisi, perempuan yang aktif berbicara tidak dibandingkan dengan laki-laki melainkan dengan perempuan yang pendiam. Hal ini memunculkan istilah bahwa perempuan yang aktif bicara dianggap cerewet. Kebungkaman tidak hanya berarti enggan untuk bicara, namun lebih lanjut lebih pada kegagalan untuk menciptakan wacana penting lainnya.

Berbeda dengan Spender yang tertarik pada dominasi bahasa perempuan, Kramae justru lebih tertarik kepada strategi perempuan dalam menghadapi ketulian laki-laki. Kramae mengamini bahwa perempuan mengalami kesulitan dalam menyuarakan pengalaman mereka dalam berekspresi yang didominasi sistem bahasa laki-laki. Ia mengatakan bahwa solusi dari masalah tersebut adalah dengan menciptakan ekspresi khas perempuan unik, namun biasanya hanya terjadi pada kelompok yang terbatas.²⁰ Ketidakmampuan perempuan untuk menjelaskan pengalamannya pada laki-laki juga menjadi salah satu alasan mengapa laki-laki terkadang kesulitan dalam memahami perempuan.

Biasanya *muted group theory* diaplikasikan pada kelompok perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan dianggap sebagai kelompok yang terbungkam. Namun peneliti lain seperti Mark Orbe dan Michael Hecter membuktikan bahwa teori tersebut dapat dipalikasikan pada kelompok marginal. Misalnya saja, kelompok kulit hitam.²¹ Selain kedua peneliti di atas, peneliti lainnya adaah Radhika Chopra yang meneliti mengenai kebungkaman kelompok laki-laki yang menjadi pengasuh

²⁰ *Ibid.*, 25

²¹ R. West dan L.H Turner, *Introducing Communication Theory: Analysis and Application 4th Edditio*, (United States: McGraw-Hill Humanities, 2009), 487

anak dalam rumah tangga.²² Hal ini membuktikan bahwa teori ini tidak hanya bisa diaplikasikan pada kelompok perempuan, melainkan para kelompok marginal lainnya.

Muted Group Theory adalah teori yang membahas mengenai kelompok yang termarginalkan dibungkam atau dibuat tidak mampu mengerti dirinya dengan baik. Pembungkaman dilakukan tanpa paksaan melainkan dengan praktek politik dan kebiasaan sehari-hari. Kelompok dominan dalam masyarakat yang menciptakan dan mengontrol sistem bahasa yang membungkam masyarakat kelompok yang termarginalkan dalam masyarakat. Terdapat tiga asumsi dasar teori kelompok bungkam, *pertama*, adanya perbedaan pemahaman antara kelompok mayoritas dan minoritas. Sebagai contoh, wanita memahami dunia secara berbeda dari laki-laki sebab persepsi pengalaman perempuan dan laki-laki berbeda. Perbedaan tersebut berakar pada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan.

Kramae menyatakan bahwa anatomi bukanlah takdir, karena ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh distribusi kekuasaan yang tidak setara antara kedua gender. Jauh sebelum revolusi industri abad ke 17 dan 18, kehidupan laki-laki dan perempuan bekerja bersama dengan beternak, menanam sayur untuk kebutuhan hidup mereka.²³ Selanjutnya, ketika revolusi industri terjadi, pabrik mulai bermunculan sehingga orang-orang lebih banyak memilih pekerjaan di luar rumah. Hal tersebut mengakibatkan adanya pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Umumnya adalah perempuan tetap mengurus rumah dan laki-laki bekerja di luar rumah. Pembagian kerja keduanya menyebabkan perbedaan pandangan laki-laki dan perempuan. Jika perempuan bekerja di rumah, maka pengalaman dunianya akan berhubungan dengan urusan rumah tangga yang ia tangani. Perbedaan tersebut menyebabkan bahasa yang tercipta antar keduanya berbeda. Misalnya, laki-laki berhubungan dengan istilah

²² *Ibid.*,

²³ C. J. Wall, Pat Gannon Leary, "A Sentence Made by Men: A Muted Group Theory Revisited," 22

perihal kebiasaan minum dan kompetisi, sedangkan perempuan berhubungan dengan isu personal seperti penampilan. Kramae juga berpendapat bahwa ranah publik dan privat memiliki jarak sehingga menimbulkan anggapan bahwa bahasa perempuan lebih pas diterapkan pada dunia privat, seperti komunikasi intrapersonal.²⁴

Kedua, keinginan kelompok mayoritas untuk selalu mempertahankan dominasi. Sebagai contoh, laki-laki mendapatkan kuasa secara politik dan selalu mempertahankan dominasi politik tersebut dengan mencegah ide dan makna dari perempuan mendapatkan penerimaan publik. Dominasi politik laki-laki menjadikan persepsi laki-laki menjadi dominan dan menggerogoti ekspresi perempuan dalam memandang dunia. Laki-laki mengambil kuasa dalam memberikan nama atas kejadian sosial. Laki-laki memegang peran lebih besar dalam membentuk bahasa. Menurut Kramae, terdapat ratusan istilah untuk menyebut perempuan dengan kecenderungan seksualitas liberal ketimbang laki-laki yang hanya memiliki beberapa istilah. Beberapa istilah yang menggambarkan perempuan dengan seksualitas liberal adalah nyai, lonte, gundik, sundal, PSK, hostes, jalang, gampangan, simpanan, kupu-kupu malam, ayam kampus, jablay dan sebagainya. Sementara istilah seksualitas liberal untuk laki-laki adalah playboy, kucing, bronis, brondong, gigolo, PK, dan sebagainya. Teori bungkam ini menekankan bahwa dominasi politik laki-laki memberikan kesempatan bagi persepsi laki-laki untuk dominan. Komunikasi perempuan terhambat karena adanya subordinat. Dominasi laki-laki pula menentukan kelayakan kehadiran perempuan pada ranah publik.²⁵

Ketiga, kelompok minoritas harus dituntut mampu menerjemahkan ide kelompok mayoritas. Sebagai contoh, perempuan harus mampu menerjemahkan ide, makna dan pengalaman unik mereka pada bahasa ekspresi laki-laki untuk mendapatkan partisipasi masyarakat. Cara berbicara perempuan dengan menggunakan emosional dan metafora hanya relevan untuk kehidupan privat, hal

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

tersebut tidak mendapatkan tempat di dunia laki-laki. Kaum laki-laki mengklaim bahwa mereka tidak mampu memahami ekspresi perempuan. Karmae juga menambahkan bahwa, pembungkaman tidak selalu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, melainkan dengan sesama perempuan. Misalnya, perempuan kulit putih Eropa-Amerika terhadap perempuan kulit hitam Afrika-Amerika. Lituchy dan Wiswall mengadakan riset mengenai asumsi ketiga ini yang menghasilkan bahwa antara laki-laki dan perempuan menggunakan bahasa yang berbeda terutama pada pilihan kata, intonasi, dan penggunaan numerik.²⁶

Perempuan yang mampu menggunakan pemilihan kata, intonasi, dan numerik sebagaimana laki-laki akan dianggap lebih percaya diri dan dapat berkuasa. Strategi yang biasanya digunakan oleh perempuan agar dapat diterima pada sistem sosial adalah melakukan translasi bahasa yang digunakan laki-laki. konsekuensinya adalah translasi tersebut akan dibarengi dengan perubahan penampilan, sikap, dan perilaku. Perempuan akan sering kali mengadopsi standar dan ritual laki-laki dalam berkomunikasi sekaligus berperilaku. Misalnya, berani sombong dan mengklaim bahwa dirinya adalah sosok yang kapabel.

Proses pembungkaman menurut teori ini dapat dilakukan dengan empat cara. *Pertama*, penertawaan, ritual, pengontrolan dan pelecehan. *Kedua*, ritual. Sebagai contoh, ritual yang paling mudah dilakukan untuk membungkam kelompok perempuan adalah upacara pernikahan. *Ketiga*, adalah pengontrolan. Pembungkaman dengan cara seperti ini biasanya terjadi atas kontrol kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas di ruang publik. *Keempat* adalah pelecehan.

²⁶ *Ibid.*,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan di Desa Candipari Kecamatan Porong dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dan pengamatan terlibat (*observation participant*). Selain itu, dengan metode berbasis literatur atau studi pustaka, yakni dengan mengkaji beberapa literatur mulai dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, *e-book*, berita dan internet yang berkaitan dengan strategi komunikasi dan marginalisasi kelompok minoritas. Dalam pelaksanaannya ketiga metode pengumpulan data tersebut tidak dipergunakan secara terpisah satu dengan yang lainnya melainkan dipergunakan secara simultan.

Subjek pada penelitian ini adalah beberapa pengikut Kapribaden dan masyarakat muslim di Desa Candipari yang dipilih menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria mereka yang memiliki jabatan baik dalam kepengurusan aliran Kapribaden maupun struktur desa. Objek yang diteliti adalah proses integrasi dan strategi komunikasi pengikut penghayat Kapribaden di Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Analisis dilakukan melalui kegiatan klarifikasi data yang telah berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber seperti data pola-pola interaksi antar umat beragama, hubungan-hubungan sosial antarumat beragama dan data-data penting lainnya. Data yang sudah diklarifikasikan dibantu dengan teori-teori kemudian direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam sebuah diskripsi yang kemudian di analisis hingga memungkinkan untuk diambil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Sejarah dan Eksistensi Kapribaden

Desa Candipari adalah salah satu desa yang terletak di antara 17 desa di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang memiliki luas wilayah 107.625 Ha. Desa ini berada 4 meter di atas permukaan laut, sehingga ketika Sidoarjo mengalami banjir, maka desa ini tidak. Batas desa ini adalah, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pesawahan,

sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kedung Boto, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wunut, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pamotan.²⁷

Masuknya aliran Kapribaden di Desa Candipari berawal ketika salah satu warga yang mencari pengobatan untuk istrinya yang mengalami sakit mental. Istrinya mampu disembuhkan oleh “pinisepuh” pengikut Kapribaden. Pasca kesembuhan istrinya, ia sekeluarga menjadi pengikut aliran ini.

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi mengapa kelompok minoritas penganut Kapribaden dapat berkembang di Desa Candipari. *Pertama*, bukan menjadi rahasia umum jika masih terdapat sebagian masyarakat yang suka sabung ayam bahkan mabuk. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat muslim memegang teguh syari’at Islam. *Kedua*, sebelum aliran Kapribaden muncul, sudah ada aliran kepercayaan sebelumnya yakni Saptodharmo. Hal tersebut bisa menjadi alasan mengapa aliran kepercayaan Kapribaden dapat berkembang. *Ketiga*, kurangnya literasi masyarakat. Mayoritas masyarakat desa hanya memikirkan apa yang akan dimakan besok dan berapa harga kebutuhan pokok saat ini. Hanya faktor ekonomi yang dipikirkan. *Keempat*, para pengikut aliran Kapribaden beranggapan bahwa media berbahasa yang tepat dengan Tuhan adalah dengan menggunakan bahasa sendiri. Artinya, dalam kegiatan ibadahnya pengikut Kapribaden menggunakan bahasa jawa. Mereka beranggapan bahasa jawa akan lebih mudah untuk dipahami dan dihayati. Keempat faktor itulah yang menjadi alasan mengapa aliran kepercayaan begitu mudah berkembang di desa tersebut.

Dinamika Kehidupan Beragama di Desa Candipari

Pada dasarnya masyarakat Desa Candipari terbiasa dengan perbedaan. Hal ini terbukti dengan berbagai agama dan aliran kepercayaan yang muncul ditengah masyarakat. Hanya saja dalam interaksi antar masyarakat terkadang menimbulkan konflik jika

²⁷ Dokumentasi Data Desa Candipari, 2009

menyinggung hal yang sensitif, seperti suku. Konflik yang timbul sering kali menimbulkan diskriminasi dalam masyarakat. Hal ini bukanlah menjadi rahasia umum karena kelompok mayoritas seringkali membatasi hak kelompok minoritas. Menjaga eksistensi kekuasaan sering kali menjadi motif.

Mayoritas masyarakat Desa Candipai adalah suku Jawa, yakni orang asli keturunan, bukan pendatang. Masyarakat desa ini mulai bertambah banyak ketika bencana lumpur lapindo terjadi. Hingga saat ini tercatat sekitar ada 1.200 KK yang terdaftar di desa tersebut.²⁸ Selain itu, terdapat suku lain yang juga tinggal ditempat ini seperti suku Madura dan Betawi. Biasanya mereka adalah orang-orang rantau maupun suami atau istri orang desa tersebut.

Eksistensi kelompok Kapribaden menjadi polemik di desa ini. Berbagai konflik muncul hingga menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok Kapribaden. Secara garis besar terdapat tiga hal yang dilakukan masyarakat untuk memarginalkan kelompok ini. *Pertama*, pelarangan penggunaan Candipari dan Candi Sumur sebagai tempat ibadah. Hal ini dipicu ketika kelompok pengikut Kapribaden melakukan ritual ibadah di Candipari. Mereka berjalan menuju Candi sambil membawa tumpeng dan sesajen. Baju yang mereka gunakan adalah atribut berwarna hitam dengan simbol Garuda dan bendera yang dikaitkan didada. Selain itu, mereka juga membawa foto Presiden Soekarno berukuran cukup besar. Setelah melakukan ritual tersebut, tumpeng tersebut dibagikan kepada orang-orang disekitar.

Masyarakat melalui tokoh agama dan perangkat desa melarang situs warisan budaya digunakan sebagai tempat ibadah. Sehingga dilakukan pertemuan yang menghasilkan keputusan bahwa Candi tidak boleh digunakan untuk beribadah. Situs tersebut hanya boleh digunakan untuk pariwisata atau kegiatan lain yang berkaitan dengan kepentingan desa. Sejak saat itu, para pengikut penghayat Kapribaden tidak pernah melakukan ritual ibadah di tempat tersebut.

²⁸ *Ibid.*,

Kedua, pelarangan menggunakan makam desa untuk pengikut Kapribaden yang meninggal dunia. Hal ini dimulai ketika salah satu pengikut Kapribaden meninggal dunia. Masyarakat menolak untuk dimakamkan di makam desa, karena dianggap bukan orang Islam. Makam di desa adalah untuk orang-orang Islam. Ditambah dengan tokoh agama yang tidak mau untuk mengurus jenazah tersebut. Akhirnya jenazah tersebut diurus oleh kelompok pengikut Kapribaden.

Terdapat beberapa perbedaan yang mencolok dalam hal mengurus jenazah. Jika orang Islam hanya menggunakan kain kafan untuk segera dimakamkan, maka jenazah kaum Penghayat Kapribaden menggunakan ikat pinggang berwarna merah. Rambut jenazah juga di potong dan diikat untuk ditaruh disebelah jenazah. Posisi jenazah ketika dimakamkan tidak menghadapbarat melainkan Utara atau Selatan. Pada akhirnya jenazah tersebut dimakamkan di tanah kosong, yakni perbatasan desa antara Candipari dengan Kedung Turi. Namun, hal tersebut juga menyebabkan konflik baru. Masyarakat Kedung Turi tidak menerima keberadaan makam tersebut. Mereka mengancam jika kelak masih ada jenazah yang dimakamkan ditempat tersebut, masyarakat Kedung Turi akan menggantinya dan menghanyutkannya ke sungai. Makam tunggal tersebut tetap berada di sana hingga saat ini.

Tidak lama setelah itu, kembali ada pengikut Kapribaden yang meninggal dunia. Hal ini kembali memunculkan konflik antara masyarakat, tokoh agama dan kelompok Kapribaden. Kelompok minoritas ini melakukan demonstrasi menuju Balai Desa untuk menuntut hak kelompok mereka. Akhirnya dilakukan perundingan antara perwakilan masyarakat, tokoh agama, perangkat desa dan kelompok Kapribaden. Perundingan tersebut menyepakati bahwa kelompok Kapribaden boleh dimakamkan disebagian tanah pemakaman desa. Namun, terletak dibagian belakang pojok. Selain itu, jika ingin mengunjungi makam, kelompok Kapribaden dilarang masuk melalui pintu depan melainkan pintu samping makam.

Ketiga adalah tuntutan masyarakat agar kelompok Kapribaden kembali menjadi muslim. Hal ini dilakukan oleh salah satu pemuka

agama yang bertanya apakah mereka tidak ingin kembali memeluk Islam ketika rapat di Balai Desa Candipari. Masyarakat akan sangat membuka lebar dan bersedia menerima mereka kembali jika kembali memeluk Islam dan melupakan ajaran dari aliran tersebut. Kaum penghayat Kapribaden menolak. Padahal, anak mereka mendapatkan pelajaran agama Islam ketika di sekolah.

Ketika masyarakat menunjukkan jarak terhadap kelompok minoritas Kapribaden, sebagian dari mereka menyadarinya. Bahkan, beberapa dari mereka masih tetap mengikuti *tablilan* yang notabene dari dulu kebiasaan ibu-ibu muslim yang tergabung dalam fatayat NU. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk menutupi identitas agar tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh masyarakat.

Proses Integrasi Sosial Penghayat Kapribaden

Konflik yang terjadi karena pengaruh agama antara masyarakat muslim dan kelompok Kapribaden di Desa Candipari, dapat diselesaikan melalui perundingan antara perwakilan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok Kapribaden. Mereka sempat melakukan rapat di Balai Desa dengan dihadiri tokoh-tokoh luar desa yang lain seperti *Babinsa*, dan perwakilan kecamatan. Masyarakat dan tokoh agama menuntuk agar mereka mau menunjukkan eksistensi mereka tidak hanya di Desa Candipari melainkan di luar, yakni dengan mengganti KTP dan KK mereka yang semula beragama Islam menjadi agama kepercayaan. Namun mereka menolak dengan alasan bahwa mereka masih Islam, hanya saja mereka mengikuti aliran kebatinan bukan agama.

Apa yang terjadi dalam masyarakat desa Candipari bisa dikatakan sebagai proses integrasi sosial karena telah memenuhi tiga syarat. *Pertama*, adanya kesepakatan mayoritas anggotanya pada nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental. Kelompok Kapribaden melakukan pembelaan dan demonstrasi untuk mengembalikan hak mereka yang dianggap dikebiri oleh mayoritas masyarakat. Mereka merasa bahwa mereka punya hak yang sama dengan umat muslim lainnya, baik dalam hal kekuasaan, ruang publik, maupun fasilitas seperti

pemakaman. *Kedua*, saling mengawasi aspek sosial, yakni menjaga terjadinya dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas. Konflik yang timbul di antara keduanya menunjukkan bagaimana kekuasaan mayoritas masih tetap didengarkan. Hal ini terlihat ketika kelompok Kapribaden tidak lagi melakukan ritual di Candipari maupun Candi Sumur setelah pelarang yang dilakukan oleh tokoh agama di desa. *Ketiga*, ketergantungan kelompok sosial dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kelompok Kapribaden tentu saja masih bergantung dan membutuhkan umat muslim di desa. Hal tersebut ditunjukkan ketika salah satu kelompok mereka meninggal, masyarakat tetap melayat. Ibu-ibu pengikut Kapribaden tetap mengikuti kebiasaan tahlilan, agar identitas mereka tertutupi. Sehingga, masyarakat tidak memperlakukan mereka secara diskriminatif.

Konflik yang terjadi dalam dinamika kehidupan beragama di Desa Candipari diselesaikan dengan melakukan usaha penguatan nilai kebersamaan. Pada dasarnya secara garis besar, perbedaan agama dan aliran kepercayaan yang muncul diantara mereka dapat dikubur dengan kesamaan suku dan nasib. Kesamaan menjadi orang Jawa dan nasib sebagai masyarakat biasa yang sudah lama menempati desa dilakukan untuk memperkuat nilai kebersamaan. Ketika ada hajatan di rumah salah satu warga, kerja bakti, kumpul RT dan lain sebagainya tetap mengundang kelompok penghayat Kapribaden adalah salah satu cara tetap menjaga nilai kebersamaan.

Fase integrasi di Desa Candipari telah berada pada fase akomodasi, yakni fase di mana kerjasama masih tetap dilakukan meskipun terdapat perbedaan paham. Hal tersebut dikarenakan adanya kepentingan dan tujuan yang sama. Dalam fase akomodasi tersebut tercapailah kompromi dan toleransi, di mana dua lawan atau lebih menjadi sama kuat. Terlihat ketika masyarakat Desa Candipari harus mengalah dan membiasakan diri melihat orang berpakaian serba hitam, penghuni musholah dan masjid disekitar mereka berkurang, dan mentoleransi mereka yang berbeda dengan keyakinan mereka. Salain itu, pengikut Kapribaden harus rela untuk melakukan ritual ibadahnya di

tempat lain, tidak di Candipari maupun Candi Sumur sebagai situs desa. Mereka harus rela memakamkan sanak saudaranya di pojok makam dan masuk melalui pintu samping.

Strategi Komunikasi Penghayat Kapribaden dalam Kultur Diskriminatif di Desa Candipari

Menurut para antropolog dan sosiolog, agama merupakan sistem keyakinan yang dianut dan diwujudkan dalam tindakan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang suci dan gaib. Dari pengertian tersebut maka terjadinya perubahan paham dan keyakinan keagamaan sangat dimungkinkan. Perubahan tersebut disebabkan karena perbedaan-perbedaan interpretasi dan cara pandang dalam memahami situasi yang terus berubah dalam menjalankan kehidupan.

Perbedaan cara pandang dan interpretasi doktrin keagamaan tentu menimbulkan perbedaan terhadap keyakinan atau aliran keagamaan. Perbedaan tersebut terjadi karena tingkat pengetahuan, pemahaman dan pengamalan setiap orang yang juga berbeda-beda. Begitu juga dengan perubahan paham keagamaan yang terjadi pada kelompok penghayat Kapribaden di Desa Candipari. Kelompok yang masih beragama Islam ini memiliki cara pandang yang berbeda dengan masyarakat lain terhadap agama yang mereka anut. Mereka beranggapan bahwa kepercayaan lokal yang mereka yakini merupakan sebuah laku spiritual sebagai jalan untuk mengenal Tuhan secara utuh melalui laku *panca gaib*. Agama Islam yang mereka anut selama ini nyatanya belum mampu memberikan kepuasan batin mereka untuk mengetahui asal-usul kehidupan serta memahami totalitas Sang Pencipta melalui *urip/roh/bidup* yang ada dalam diri setiap manusia.

Dalam konteks ini, konflik yang terjadi antara kelompok penghayat Kapribaden di Desa Candipari dengan masyarakat muslim sekitar adalah pergesekan kepentingan kelompok identitas yang berbasis pada budaya dan keagamaan. Para penghayat Kapribaden yang sejatinya tetap beragama Islam juga menjalankan ritus-ritus Kapribaden dengan

sistem simbol yang bersumber pada pola-pola budaya atau idiom kepercayaan lokal, dan ini sudah berlangsung cukup lama hingga membuat Kapribaden semakin berkembang di desa tersebut. Perbedaan ritus dan paham keagamaan yang terjadi antara kelompok penghayat Kapribaden dengan masyarakat muslim inilah yang menjadi pemicu konflik. Sebagai identitas kepercayaan lokal, ritus-ritus dalam Kapribaden yang dilakukan oleh para penghayat menimbulkan reaksi negatif. Oleh sebab itu masyarakat muslim sekitar terutama tokoh-tokoh agama, ritus yang dilakukan penghayat Kapribaden dianggap menyimpang bahkan keluar dari ajaran Islam. Konflik ini pada akhirnya muncul ke permukaan dengan melibatkan prasangka dan stigma buruk, yaitu melabeli para penghayat sebagai kelompok yang sesat, kafir dan pengikut ajaran klenik.

Pelabelan sesat, kafir dan klenik pada kelompok penghayat ini pada akhirnya melahirkan diskriminasi. Dalam konsep diskriminasi agama, diskriminasi dapat dilakukan melalui kebijakan untuk mengurangi, memusnahkan, menaklukkan, memindahkan, melindungi secara legal, menciptakan pluralisme budaya dan mengasimilasi kelompok lain. Diskriminasi biasanya didahului dengan prasangka, yang artinya bersifat negatif. Diskriminasi dibagi menjadi dua yakni diskriminasi secara langsung dan tidak langsung.

Persoalan mengenai kelompok Kapribaden di Desa Candipari merupakan fenomena yang bisa ditinjau menggunakan teori kelompok bungkam. Sesuai dengan substansinya, dari keempat substansi teori kelompok bungkam persoalan ini masuk kedalam masalah perbedaan kadar kekuasaan. Artinya, perihal mayoritas dan minoritas. Kelompok minoritas adalah penganut kepercayaan Kapribaden, sedangkan kelompok mayoritas adalah sesepuh dan masyarakat Desa Candipari yang beragama Islam.

Strategi komunikasi yang ditempuh untuk mengembalikan hak mereka cukup kompleks. Kelompok Penghayat Kapribaden termarginalkan oleh kelompok muslim di Desa Candipari. Kelompok mayoritas ini melakukan pengontrolan dalam proses pembungkaman.

Hal tersebut dibuktikan dengan pelarangan ibadah di situs desa, pemaksaan untuk kembali memeluk agama Islam dan penolakan tempat pemakaman yang sama oleh masyarakat. Selain itu, mereka pasti merasa terasingkan, karena ketika salah satu kelompok mereka meninggal mereka harus mengurusnya bersama dengan kelompok mereka yang jumlahnya tidak cukup banyak.

Jika dianalisa dengan asumsi dasar yang ditawarkan oleh teori kelompok bungkam, maka secara garis besar adalah karena keinginan menjaga kekuasaan dan pemberhentian atau meminimalisir penyebaran kepercayaan yang dianggap “sesat” oleh masyarakat. Asumsi dasar teori kelompok bungkam yang pertama adalah pemahaman yang berbeda. Perbedaan pemahaman ini terkait dengan waktu dan kepercayaan. Dalam konteks waktu, Islam datang dan menyebar terlebih dahulu di desa tersebut, sedangkan aliran kepercayaan ini masih baru. Maka bukan menjadi hal yang aneh jika banyak dari masyarakat yang tidak mempercayai aliran kepercayaan tersebut menganggapnya sesat. Masyarakat bukanlah barang yang mudah menerima pembaharuan. Apa yang dianggap benar oleh masyarakat, itulah yang mereka bela dan suarkan baik oleh kelompok minoritas Kapribaden maupun mayoritas muslim.

Kedua adalah perbedaan kekuasaan. Artinya kelompok mayoritas merasa *insecure* atau takut jika aliran kepercayaan tersebut semakin menyebar karena sesepuh desa dan masyarakat merasa bertanggung jawab akan kelangsungan agama yang mereka yakini. Kelompok mayoritas akan berusaha tetap membungkam kelompok minoritas. Dalam kasus ini, hal tersebut dilakukan dengan dua cara yakni pelarangan ibadah dan penolakan pemakaman yang sama oleh masyarakat desa. Meskipun pada akhirnya mereka diperbolehkan untuk memakamkan anggota mereka di pemakaman desa, namun mereka tetap dihalangi dengan tidak boleh masuk melalui pintu utama makam.

Ketiga adalah perbedaan penerjemah ide. Menurut Dale Spender terdapat dua ekspresi kelompok *muted* yakni melakukan translasi pesan pada ekspresi kelompok dominan atau tetap

menggunakan ekspresi sendiri hingga dianggap bungkam. Kelompok minoritas Kapribaden melakukan ekspresi yang pertama yakni translasi pesan pada ekspresi kelompok dominan. Melihat studi kasus diatas perihal pemakaman, pada awalnya kelompok minoritas bungkam karena tetap mematuhi kelompok dominan untuk memakamkan penganutnya di perbatasan. Selain itu juga tidak lagi melakukan ritual keagamaan di Candi dan lebih melakukan ritual secara sembunyi-sembunyi. Namun, kelompok ini sempat melakukan translasi dengan mencoba memberikan perlawanan ketika salah satu pengikutnya ada yang meninggal lagi, sehingga mendapatkan tempat di pemakaman yang sama meskipun dengan syarat.

KESIMPULAN

Proses integrasi sosial di Desa Candipari memang terjadi, karena telah memenuhi tiga syarat. *Pertama*, adanya kesepakatan mayoritas anggotanya pada nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental. *Kedua*, saling mengawasi aspek sosial, yakni menjaga terjadinya dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas *Ketiga*, ketergantungan kelompok sosial dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Fase integrasi yang terjadi masih berada pada fase akomodasi. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh kelompok Kapribaden adalah menggunakan translasi dengan memberikan perlawanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Taftazani, Abu al-Wafa al-Ghanimi. *Sufi dari Zaman ke Zaman*. Bandung: Penerbit Pustaka. 1985.
- Aryono. "Pergulatan Aliran Kepercayaan Dalam Panggung Politik Indonesia. 1950-an-2010-an: Romo Semono Sastrodiharjo dan Aliran Kapribaden". *Jurnal Sejarah Citra Lekha*. 3 (1). 2008.
- Dokumentasi Data Desa Candipari. 2009
- Fulthoni. *Buku Saku Kebebasan Bergama dan Berkeyakinan [Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan]*. Jakarta: ILRC. 2009.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java (Abangan. Santri. Priyayi dalam Masyarakat Jawa)* terj. Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya. 1983
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*. Terj. Robert MZ Lawang. Jakarta: Penerbit Gramedia. 1986.
- Kapribaden, Paguyuban Penghayat. "Sejarah Kapribaden". Dalam http://www.kapribaden.org/K_Sejarah%20Kapribaden.php, diakses pada 25 Desember 2019
- Leary, C. J. dan Wall., Pat Gannon. "A Sentence Made by Men: A Muted Group Theory Revisited." *The European Journal of Women's Studies*. 3(6). 1999.
- Mufid, Ahmad Syafii (ed). *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2012.
- Mulder, N. *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil*. Jakarta: Gramedia. 1984.
- Nugroho, Haryo Aji. *Dunia Mistik Orang Subud*. Cet-1. Salatiga: STAIN Salatiga Press. 2014.
- Rauf, Maswadi. *Konsensus Politik Sebuah Penajajaran Teoritik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 2000.
- Ritzer, George dan Goodman. Douglas J. *Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Modern*. terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2009.

- Rusadi, Eko. *Ugasan Torop Dalam Ugamo Malim (Studi Kasus Di Lembaga Sosial Milik Masyarakat Parmalim)*. Medan: Skripsi Tidak diterbitkan. 2010
- Susanto, Astrid S. *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Bina Cipta. 1977.
- Syafi'udin, Moch.. *Konsepsi Manusia Menurut Penghayat Kapribaden*. Surabaya: Skripsi tidak diterbitkan. 1996.
- Turner, L.H dan R. West. *Introducing Communication Theory: Analysis and Application 4th Eddition*. United States: McGraw-Hill Humanities. 2009.
- Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam <http://produk-hukum.kemenag.go.id/?q=&s=headline&t=1965> diakses 25 Desember 2019
- Wirjohardjo, Wahjono GS. *Naskah Paguyuban Penghayat Kapribaden dalam Inventarisasi DepDikBud. Saraseban Agung IV: Paguyuban Penghayat Kapribaden*. (Jakarta; tanpa penerbit. 2007)